

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. (2015). Hukum Perjanjian “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.” Pranadamedia Grup.
- Agung, T. P. (2015). Hak Dan Kewajiban Pemborong Dalam Perjanjian Pembangunan Rumah Oleh CV. Graha Utama Bandara. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arief Rahman, S.H., M.Hum. (2015). Pengantar Hukum Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ariffien, S. P. (2018). Aspek Hukum Keterlambatan Penyelesaian Jalan Tol Soroja Oleh PT. Citra Marga Lintas Jabar (PT. CMLJ). 19–62.
- Budiono, H. (2011). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti.
- Djumialdji. (2005). Perjanjian Pemborongan. Rineka Cipta.
- Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta Kencana.
- Dr. Muhammad Syaifuddi, S.H., M.Hum. (2016). Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Mandar Maju.
- H. Riduan Syahrani, S.H. (2006). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. PT. Alumni.
- Hansen, S. (2018). Manajemen Kontrak Konstruksi. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. (2014). Konsep Hukum Perdata. PT. RajaGrafindo Persada.
- P.N.H. Simanjuntak, S.H. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Prenadamedia Group.
- Pipin Syarifin, S.H., M.H. & Dra. Dedah Jubaedah, M.Si. (2012). Hukum Dagang Di Indonesia. CV. Pustaka Setia.

- Salim, H.S. (2013). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- _____. (2015). *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Simamora, Y. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. LaksBang PRESSindo.
- Subekti. (2010). *Arbitrase Perdagangan*. Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Yahman. (2016). *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Pranadamedia Grup.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

C. Sumber Lain

- Agusta, R. A. (2020). *Tanggung Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi COVID-19*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 6(November), 5–24.
- Aulia, T. (2017). *Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontraktor Pemborongan Pintu Besi Tahan Api antara PT. Delta Power Energy dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk*. BMC Public Health,

- 5(1), 1–8.
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298>
- Bambang Poerdyatmono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 8(1), 78–90.
- Febiyanti, V., Darmoko, M., & Dr. Karim. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 1–11.
- Harahap, N. P. (2019). Wanprestasi PT. Go-Jek Cabang Kota Bandung Terhadap Mitra Kerja Sama dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan. *Fakultas Hukum Unpas*, 38–69.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43776>
- Harjono, D. K. (2014). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Karyatulisilmiah.Com*.
- Irianto, K. D., & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 134–148.
<https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2463>
- Jannah, M. P. N., & Musjtar, D. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan. *UIR Law Review*, 3(2), 41–49.
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489)
- Medan, U., & Area, M. (2018). Uraian Teori Perlindungan Hukum. *Pemutusan Hubungan Kerja*. 1(1), 1–12.
- Mulyadi, L. (2009). Teori Hukum Pembangunan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29.
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf
- Nara, (2019). Syarat Sah Kontrak, Subjek dan Objek Hukum Kontrak. *Academia.edu*.
https://www.academia.edu/12900986/SYARAT_SAHNYA_KONTRAK_SUBYEK_DAN_OBYE%0AK_HUKUM_KONTRAK

- Nasution, M. S. (2017). Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/13840003_3_file5
- Riskanita, D. (2019). Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Alih Fungsi Lahan Perbukitan Menjadi Lahan Perkebunan di Kabupaten Ponorogo, 9–25.
- Septianingrum, R. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Merek Terkenal Menjadi Merek Generik dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia. 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yusri, Y. (2017). Garis-Garis Besar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Anterior Jurnal*, 16(2), 195–206. <https://doi.org/10.33084/anterior.v16i2.40>